

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tertuang dalam pembukaannya menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pendidikan yang merata dan bermutu akan membuat warga Negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk menunjang bekal hidup kesehariannya serta sebagai bagian dari wahana untuk meningkatkan taraf hidup dan kompetensinya yang pada gilirannya mendorong tegaknya masyarakat modern dan sejahtera yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Penegasan peran penting pendidikan lebih jauh termaktub dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan;
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara

- serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu:

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

4. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam rangkaian upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan, Dinas Pendidikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai rancangan dokumen perencanaan tahun 2011-2015 yang akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Renstra Kementerian pendidikan Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang disusun sebagai dokumen perencanaan yang menuangkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan selama kurun 2011 sampai dengan tahun 2015 serta target yang harus dicapai dengan memperhitungkan kondisi dan potensi yang ada serta dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dijumpai dan diprediksi akan timbul dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan adalah dalam rangka terwujudnya rumusan kebijakan dan program strategis sebagai arah dan pedoman bagi seluruh komponen penyelenggara pendidikan dibawah pembinaan SKPD Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta menjamin akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai pelaksanaan tugas yang ekonomis, efisien dan efektif serta produktif.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan menampilkan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penyusunan
2. Bab II Gambaran Pelayanan yang menampilkan Tupoksi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya serta Kinerja Pelayanan
3. Bab III Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang menampilkan Identifikasi Permasalahan, Telaah Visi dan Misi RPJMD, Telaah Renstra Kementerian Pendidikan Nasional serta Isu Strategis
4. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang menampilkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan
5. Bab V Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja;
6. Bab VI Indikator Kinerja
7. Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan adalah:

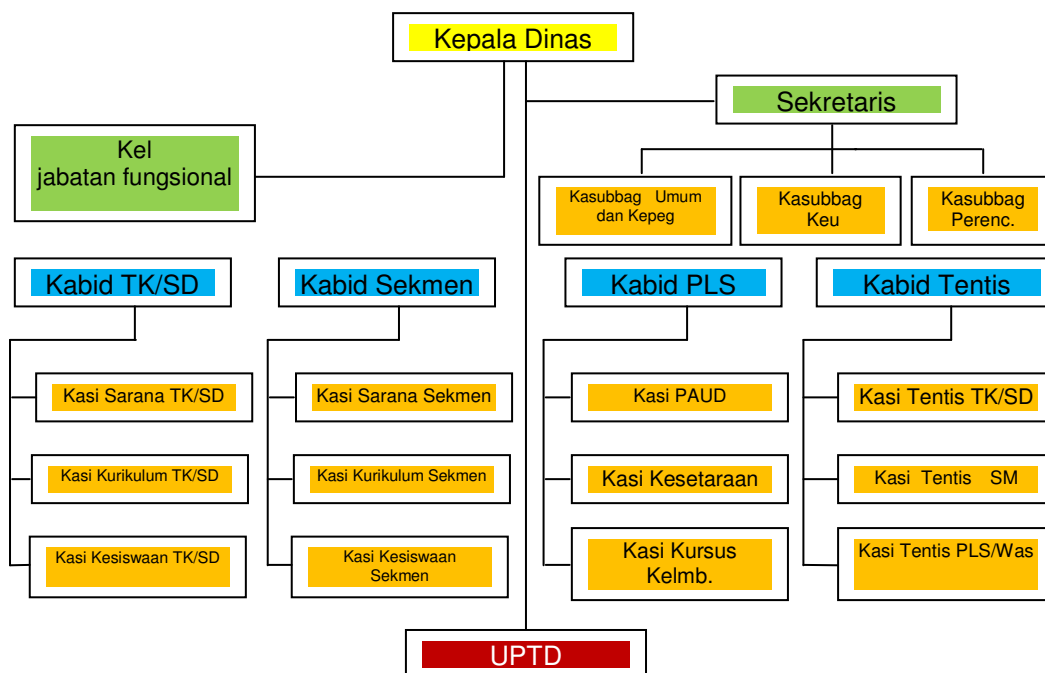
1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program dan kegiatan.
2. Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan.
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan.
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan.
7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan.
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan.
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
10. Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah.
11. Pengaturan dan pengawasan penerimaan peserta didik sekolah, keuangan, ketata-laksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan

gedung sekolah dan tenaga teknis, ijasah serta perpustakaan sekolah.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:



B. SUMBER DAYA

1. Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai struktural maupun fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, baik pada Kantor Dinas, UPTD Pendidikan Kecamatan, lembaga sekolah terinci sebagai berikut :

- Pegawai pada Kantor Dinas = 119 orang
- Pegawai pada UPTD = 389 orang
- Pegawai lembaga sekolah = 12.782 orang

2. Pejabat Struktural dan Fungsional

Pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang baik yang berada di Kantor Dinas, UPTD Kecamatan maupun lembaga sekolah meliputi:

NO.	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	IIb	1	Kepala Dinas
2	IIIa	5	Sekretaris, Kepala Bidang
3	IVa	49	Kasubbag, Kasi, Ka UPTD/ Ka SKB
4	IVb	5	KTU SMK Negeri
5	Va	78	KTU SMP dan SMA Negeri

Sedangkan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang meliputi para Pengawas Sekolah, Guru dan Pamong Belajar pada SKB yang jumlahnya sebagai berikut:

- Pengawas Sekolah = 132 orang
- Guru PNS TK = 177 orang
- Guru PNS SD = 8.633 orang
- Guru PNS SMP = 2.370 orang
- Guru PNS SLB = 56 orang
- Guru PNS SMA = 734 orang
- Guru PNS SMK = 345 orang
- Pamong Belajar SKB = 14 orang

3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang meliputi:

- a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari:
 - 1 (satu) ruang Kepala Dinas
 - 1 (satu) ruang Sekretaris
 - 3 (tiga) ruang Sub Bagian
 - 4 (empat) ruang Bidang
 - 1 (satu) ruang rapat terbatas
 - 1 (satu) ruang Pengawas
 - 1 (satu) ruang IT
 - 1 (satu) gudang
 - 1 (satu) ruang pertemuan terbuka (pendopo)
- b. Komputer sebanyak 19 unit
- c. Mesin ketik sebanyak 6 unit
- d. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor UPTD di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta SKB.

4. Anggaran 2006 – 2010

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang yang tertuang pada DPA Dinas Pendidikan maupun APBD Propinsi dan APBN tergambar sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

NO.	TAHUN	APBD KAB		APBD PROV	APBN
		NON PROGRAM	PROGRAM		
1	2006	334.118.597	7.821.915	6.900.000	139.714.631
2	2007	399.472.865	8.799.855	6.925.000	138.901.594
3	2008	422.335.507	29.869.557	5.472.162	146.855.128
4	2009	485.777.529	24.822.420	4.727.780	210.357.493
5	2010	531.016.807	26.765.710	31.302.460	176.896.770

C. KINERJA PELAYANAN

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas yang mampu dinikmati dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara demokratis dan berkeadilan dilihat dari sosial ekonomi, geografis maupun psikologis yaitu baik mereka yang tinggal di wilayah perkotaan serta pedesaan maupun mereka yang berdomosili di wilayah terpencil dan sulit transportasi ataupun mereka dari keluarga mampu maupun dari keluarga miskin serta mereka yang berbakat ataupun yang kurang berbakat seluruhnya merupakan bagian dari tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang.

Pada sisi lain pencapaian pembangunan dan pengembangan pendidikan pada tingkat nasional maupun di tingkat wilayah baik provinsi maupun pada tingkat kabupaten belum menunjukkan hasil yang optimal dan mencapai target yang diharapkan.

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, kondisi pencapaian UNAS dan UAS-BN, kapasitas dan mutu sarana prasarana pembelajaran, kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik, serta disparitas antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja merupakan hal-hal penting yang harus mendapat perhatian serta diperlukan langkah strategis dan terobosan-terobosan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Malang.

Kondisi dan gambaran umum kinerja pendidikan di Kabupaten Malang hingga tahun 2010 dapat disampaikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	DATA KELEMBAGAAN			
1	Murid			
	PAUD	Siswa	7.676	
	TK	Siswa	60.577	
	SD	Siswa	206.307	
	SDLB	Siswa	335	
	SMP	Siswa	72.087	
	SMP Terbuka	Siswa	1.853	
	SMP Satu Atap	Siswa	2.558	
	SMPLB	Siswa	92	
	SMA	Siswa	17.621	
	SMA Terbuka	Siswa	239	
	SMLB	Siswa	49	
	SMK	Siswa	25.605	
2	Lembaga Sekolah			
	PAUD	Unit	223	
	TK	Unit	1.106	
	SD	Unit	1.165	
	SDLB	Unit	9	
	SMP	Unit	272	
	SMP Terbuka	Unit	18	
	SMP Satu Atap	Unit	22	
	SMPLB	Unit	8	
	SMA	Unit	69	
	SMA Terbuka	Unit	1	
	SMLB	Unit	5	
	SMK	Unit	80	
3	Guru			
	PAUD	Guru	903	
	TK	Guru	2.993	
	SD	Guru	12.121	
	SDLB	Guru	49	
	SMP	Guru	5.934	
	SMP Terbuka	Guru	357	
	SMPLB	Guru	29	
	SMA	Guru	1.842	
	SMA Terbuka	Guru	30	
	SMLB	Guru	16	

	SMK	Guru	2.313	
4	Ruang Kelas			
	PAUD	Ruang	223	
	TK	Ruang	2.644	
	SD	Ruang	7.301	
	SDLB	Ruang	63	
	SMP	Ruang	2.432	
	SMP Terbuka (TKB)	Ruang	60	
	SMPLB	Ruang	18	
	SMA	Ruang	671	
	SMA Terbuka	Ruang	4	
	SMLB	Ruang	18	
	SMK	Ruang	781	
5	Angka Partisipasi			
	a. PAUD			
	- APK	%	36,29	
	b. SD/MI			
	- APK	%	112,94	
	- APM	%	69,00	
	- APS	%	0,16	
	- Angka Transisi	%		
	- Angka Murid Mengulang	%	5,84	
	- Angka Lulusan	%	100,00	
	c. SMP Sederajat			
	- APK	%	92,26	
	- APM	%	72,43	
	- APS	%	0,88	
	- Angka Transisi	%		
	- Angka Murid Mengulang	%	0,27	
	- Angka Lulusan	%	91,34	
	d. SMA Sederajat			
	- APK	%	39,25	
	- APM	%	34,61	
	- APS	%	1,22	
	- Angka Transisi	%		
	- Angka Murid Mengulang	%	0,38	
	- Angka Lulusan	%	94,94	
B	DATA LULUSAN DAN ANGKA Dropt Out (DO)			
1	Jumlah lulusan SD	Siswa	31.073	
2	Jumlah lulusan SMP	Siswa	17.271	
3	Jumlah lulusan SMP Terbuka	Siswa	204	
4	Jumlah lulusan SMA	Siswa	5.411	
5	Jumlah lulusan SMK	Siswa	4.912	
6	Jumlah Drop Out (DO) SD	%	0,16	
7	Jumlah Drop Out (DO) SMP	%	0,88	
8	Jumlah Drop Out (DO) SMA	%	1,22	
C	RASIO SMA : SMK			
1	SMK			
	Jumlah Sekolah	Lembaga	80	
	Jumlah Siswa	Siswa	25.605	
	Jumlah Guru	Guru	2.313	
2	SMA			
	Jumlah Sekolah	Lembaga	69	
	Jumlah Siswa	Siswa	17.621	
	Jumlah Guru	Guru	1.842	
3	MA			
	Jumlah Sekolah	Lembaga	46	

	Jumlah Siswa	Siswa	6.405
	Jumlah Guru	Guru	904
	RASIO SMK : SMA/MA	Lembaga	41 : 59
		Siswa	52 : 47
D	KONDISI GEDUNG		
	a. SDN		
	- Baik	Ruang	3.566
	- Rusak Ringan	Ruang	1.558
	- Rusak Berat	Ruang	1.786
	b. SDS		
	- Baik	Ruang	199
	- Rusak Ringan	Ruang	69
	- Rusak Berat	Ruang	39
	c. SMPN		
	- Baik	Ruang	930
	- Rusak Ringan	Ruang	105
	- Rusak Berat	Ruang	52
	d. SMPS		
	- Baik	Ruang	672
	- Rusak Ringan	Ruang	159
	- Rusak Berat	Ruang	48
	e. SMAN		
	- Baik	Ruang	211
	- Rusak Ringan	Ruang	24
	- Rusak Berat	Ruang	2
	f. SMAS		
	- Baik	Ruang	288
	- Rusak Ringan	Ruang	27
	- Rusak Berat	Ruang	15
	g. SMKN		
	- Baik	Ruang	93
	- Rusak Ringan	Ruang	0
	- Rusak Berat	Ruang	0
	h. SMKS		
	- Baik	Ruang	421
	- Rusak Ringan	Ruang	46
	- Rusak Berat	Ruang	112
E	SARANA PRASARANA		
	a. SDN		
	- Perpustakaan	Unit	513
	- UKS	Unit	434
	b. SDS		
	- Perpustakaan	Unit	29
	- UKS	Unit	26
	c. SMPN		
	- Perpustakaan	Unit	80
	- UKS	Unit	64
	- Laboratorium IPA	Unit	91
	- Laboratorium Bahasa	Unit	39
	- Multi Media	Unit	21
	- Ruang Komputer	Unit	56
	- Ruang Ketrampilan	Unit	31
	d. SMPS		
	- Perpustakaan	Unit	125
	- UKS	Unit	91
	- Laboratorium IPA	Unit	64
	- Laboratorium Bahasa	Unit	14

	- Multi Media	Unit	6	
	- Ruang Komputer	Unit	121	
	- Ruang Kerampilan	Unit	26	
	e. SMAN			
	- Perpustakaan	Unit	10	
	- UKS	Unit	11	
	- Laboratorium IPA	Unit	22	
	- Laboratorium Bahasa	Unit	11	
	- Multi Media	Unit	2	
	- Ruang Komputer	Unit	15	
	- Ruang Ketrampilan	Unit	9	
	f. SMAS			
	- Perpustakaan	Unit	29	
	- UKS	Unit	32	
	- Laboratorium IPA	Unit	53	
	- Laboratorium Bahasa	Unit	10	
	- Multi Media	Unit	11	
	- Ruang Komputer	Unit	54	
	- Ruang Ketrampilan	Unit	10	
	g. SMKN			
	- Perpustakaan	Unit	3	
	- UKS	Unit	4	
	- Laboratorium IPA	Unit	4	
	- Laboratorium Bahasa	Unit	1	
	- Multi Media	Unit	4	
	- Ruang Komputer	Unit	10	
	- Bengkel	Unit	35	
	- Ruang Praktek	Unit	4	
	h. SMKS			
	- Perpustakaan	Unit	49	
	- UKS	Unit	42	
	- Laboratorium IPA	Unit	14	
	- Laboratorium Bahasa	Unit	12	
	- Multi Media	Unit	14	
	- Ruang Komputer	Unit	72	
	- Bengkel	Unit	55	
	- Ruang Praktek	Unit	27	
F	KELAYAKAN GURU			
	a. SD			
	- Layak	%	50,46	
	- Tidak layak	%	49,54	
	b. MI			
	- Layak	%	42,36	
	- Tidak layak	%	57,64	
	c. SMP			
	- Layak	%	81,67	
	- Tidak layak	%	18,33	
	d. MTs			
	- Layak	%	68,64	
	- Tidak layak	%	31,36	
	e. SMA			
	- Layak	%	93,76	
	- Tidak layak	%	6,24	
	f. SMK			
	- Layak	%	90,24	
	- Tidak layak	%	9,76	
	g. MA			
	- Layak	%	82,10	

	- Tidak layak	%	17,90	
G	SERTIFIKASI GURU			
	TK/RA	Guru	189	
	SD/MI	Guru	2.559	
	SMP/MTs	Guru	1.778	
	SM/MA	Guru	575	
	SMK	Guru	359	
	SLB	Guru	32	
	Pengawas	Guru	99	
H	PENYERAPAN LULUSAN SMK			
	a. Komposisi Lulusan SMK			
	- Teknologi industri	%	48,24	
	- Elektronika	%	7,78	
	- Pertanian/Petern./Kelautan	%	2,10	
	- Bisnis Manajemen	%	35,92	
	- Pariwisata	%	1,77	
	- Kesej./Kerajinan & Seni	%	4,16	
	b. Lulusan SMK terserap			
	- industri Pengolahan	%	15,66	
	- Pertanian	%	4,25	
	- Pertambangan dan penggalian	%	3,11	
	- Listrik Gas & Air	%	9,48	
	- Bangunan	%	3,23	
	- Perdagangan dll	%	21,41	
	- Angkutan	%	2,32	
	- Keuangan	%	2,40	
	- Jasa Kemasyarakatan	%	20,90	
	c. Lulusan SMK tidak terserap	%	17,24	

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan kondisi pencapaian pembangunan pendidikan baik tingkat ketercapaian maupun berbagai permasalahan yang ada serta dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka dapat dilakukan stratifikasi untuk melihat sejauh mana peluang serta tantangan yang harus dihadapi dalam kurun tahun 2011 hingga tahun 2015.

1. Peluang

- a. Telah dikeluarkannya berbagai peraturan dan kebijakan pembangunan pendidikan.
- b. Meningkatnya perhatian dan kepedulian dari berbagai kalangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan bagi putra putrinya.

- d. Adanya berbagai program bantuan pembangunan pendidikan yang disediakan dari anggaran pemerintah pusat maupun provinsi.
- e. Adanya komitmen dan tingginya perhatian dari kalangan legislatif pada tingkat kabupaten dan stakeholder pendidikan lainnya terhadap pembangunan dan upaya kemajuan pendidikan.
- f. Berkembangnya potensi teknologi yang dapat dijadikan wahana peningkatan kualitas pembelajaran.
- g. Banyaknya lembaga perguruan tinggi yang bersedia memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan.
- h. Berkembangnya sentra-sentra industri sebagai potensi pengembangan pendidikan kejuruan.

2. Tantangan

- a. Banyaknya penduduk usia sekolah yang belum tertampung pada lembaga pendidikan.
- b. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Malang yang luas dan domisili penduduk yang menyebar di pedesaan dan wilayah pinggiran serta sulit transportasi.
- c. Kondisi rendahnya sosial ekonomi serta tingkat pendidikan dan wawasan sebagian besar masyarakat.
- d. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- e. Tingginya disparitas mutu antar lembaga sekolah.
- f. Belum berkembangnya budaya mendidik dan membelajarkan anak di luar jam pelajaran sekolah.
- g. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan guru minimal harus S1.
- h. Masih rendahnya dukungan dunia usaha dan dunia industri pada pengembangan dan penyiapan tenaga trampil pada pendidikan kejuruan.

Tabel 2.1.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA (%)					REALISASI CAPAIAN (%)					RASIO CAPAIAN (%)				
		2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
	BELANJA															
I	Belanja Tidak Langsung															
1	Gaji dan Tunjangan															
II	Belanja Langsung															
1	Program rutin SKPD	90	90	90	90	90	90	90	90	90	85	100	100	100	100	94
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	60	60	60	60	60	55	55	55	55	50	92	92	92	92	83
	PTertampungnya penduduk usia 2-6 tahun pada layanan PAUD yang bermutu															
3	Program Wajib Pendidikan Dasar 9 tahun Belajar	85	90	90	90	95	80	80	80	80	85	94	89	89	89	89
	Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu															
4	Program Pendidikan Menengah	85	85	85	90	90	80	80	80	80	80	94	94	94	89	89
	Tertampungnya penduduk 16-18 thn pada lembaga SMA/SMK/MA yang berkualitas dan relevan															
5	Program Pendidikan Luar Biasa	60	60	60	60	60	50	55	55	55	55	83	92	92	92	92
	Tertampungnya warga berkebutuhan khusus pada pelayanan PLB yang berkualitas															
6	Program Pendidikan Non Formal	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	93	93	93	93	93
	Terwujudnya layanan pendidikan life skill															

	bagi warga masyarakat putus sekolah															
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Ten. Kepend	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten profesional dan sejahtera															
	,															
8	Manajemen Pelayanan Pendidikan	90	90	90	90	90	80	80	80	80	80	89	89	89	89	89
	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan pendidikan yang komprehensif dan berkualitas															

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Memperhatikan pada kondisi yang ada, maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi berdasar tiga pilar pendidikan nasional yaitu:

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Dengan memperhatikan pencapaian dan kondisi internal serta pengaruh eksternal, identifikasi permasalahan pembangunan pendidikan dalam kurun 2010 - 2015 adalah:

1. Permasalahan pemerataan

Permasalahan pemerataan dan perluasan akses pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga ke jenjang pendidikan menengah, timbul disamping karena dipengaruhi oleh faktor-faktor internal pengelolaan pendidikan, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi serta tingkat pendidikan dan wawasan masyarakat.

Pada jenjang PAUD permasalahan yang ada adalah masih banyaknya penduduk usia 2- 6 tahun belum tertampung pada lembaga PAUD. Dengan target APK sebanyak 70 % pada tahun 2015, maka masih 52.933 anak usia 2- 6 tahun yang belum mendapatkan layanan PAUD.

Pada jenjang SD dengan sasaran Angka Partisipasi Murni (APM) 100,00 %, maka masalah pemerataan SD yang dihadapi adalah:

- a. Masih terdapat 2.256 anak atau 0,90 % anak usia 7-12 tahun yg belum tertampung di jenjang SD.

- b. Dari hasil kajian, penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah adalah anak-anak penyandang tuna dari keluarga tidak mampu yang mereka kebanyakan tinggal di pedesaan dan wilayah terpencil yang sulit jangkauan pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.
- c. Kekurangan ruang kelas pada lembaga SD sebanyak 254 ruangl. Kekurangan lokal terdapat pada lembaga sekolah-sekolah yang muridnya besar yang biasanya berada pada lokasi perkotaan dan padat penduduk, sedang pada beberapa lembaga sekolah di pedesaan dan wilayah terpencil dengan kepadatan penduduk rendah kebutuhan ruang kelas masih belum dirasakan.
- d. Dengan asumsi pada masing-masing sekolah terdapat 1 orang Kepala Sekolah, 6 orang guru kelas, 1 orang guru Penjaskes dan 1 orang guru agama, pada lembaga SD kekurangan guru sebanyak 2.769 orang.
- e. Kekurangan guru pada lembaga SD disebabkan banyaknya guru yang telah memasuki masa pensiun pada lembaga SD Negeri, sedang pengangkatan PNS masih sangat terbatas.

Sedang pada jenjang SMP dengan sasaran dan target APK dan APM pada tahun 2015 sebesar 98,00 % dan 100 % serta berdasarkan indikator internal dan eksternal yang ada, maka masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 6.153 anak usia 13-15 tahun yg belum tertampung di SMP atau sebesar 5,74 %.
- b. Masih terdapat kekurangan ruang kelas pada lembaga SMP sebanyak 133 Ruang atau 5,08 %.
- c. Terdapat kekurangan dan kelebihan guru (persebaran) yang tidak merata untuk masing-masing bidang studi pada lembaga SMP.

Pada jenjang SM/MA Bila sasaran APK dan APM tahun 2015 sebesar 65,00 % dan 52,00 % serta berdasarkan indikator internal dan eksternal, maka masalah yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Masih terdapat 25.124 Orang anak usia 16 – 18 tahun yang belum tertampung di SM dan MA atau 24,77 %.

- b. Pada lembaga SMA dan SMK terdapat kekurangan ruang kelas sebanyak 114 ruang kelas atau sebesar 8,01 %.
- c. Terdapat kekurangan dan kelebihan guru yang tidak merata untuk masing-masing bidang studi pada lembaga SMA dan SMK.

2. Permasalahan Mutu

Permasalahan mutu pendidikan timbul karena pengaruh langsung faktor-faktor internal diantaranya kualitas guru dan proses belajar mengajar, disamping dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh faktor eksternal antara lain kesehatan siswa, mutu gizinya, rendahnya biaya operasional, dan terbatasnya partisipasi orang tua siswa.

Pada lembaga SD berdasarkan arahan peningkatan mutu SD yang diinginkan serta dengan memperhitungkan indikator internal dan eksternal, maka masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah:

- a. Pada lembaga SD masih terdapat guru yang belum S1 sebanyak 5.813 Orang (49,93%). Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru-guru tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak layak mengajar.
- b. Diperkirakan kebutuhan rehabilitasi bangunan SD selama kurun 2011-2015 adalah sebanyak 4.206 lokal (54,82 %), yang memerlukan Rehabilitasi ringan sebanyak 2.229 buah (29,05%) dan Rehabilitasi Berat sebanyak 1.977 Buah (25,77 %).
- c. Jika diasumsikan masing-masing lembaga SD mempunyai ruang perpustakaan, lapangan Olah Raga (OR) dan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pada SD masih kekurangan ruang perpustakaan 903 ruang (77,11 %), 134 lapangan OR (11,44%) dan 25 ruang UKS (2,13%).

Pada lembaga SMP dengan memperhitungkan indikator internal dan eksternal, maka masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah:

- a. Masih terdapat guru SMP yang belum S1 sebanyak 1.368 902 orang (21,28%). Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru-guru tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak layak mengajar.
- b. Diperlukan rehabilitasi berat ruang kelas sebanyak 118 lokal (6,14%) dan rehabilitasi ringan 246 lokal (12,80%) pada SMP;
- c. Pemilikan ruang perpustakaan baru mencapai 182 unit (68,16%), Lapangan OR 117 lokasi (43,82%) dan ruang UKS 144 unit (53,93%) pada lembaga SMP.
- d. Kebutuhan Lab mengacu pada SNP adalah Lab IPA, Lab Bahasa dan Lab Komputer, sehingga kepemilikan yang ada baru mencapai 40,20 % pada SMP.
- e. Mutu lulusan masih kurang yang ditandai dengan menurunnya perolehan hasil NEM, yaitu NEM lulusan rata-rata 5,52 sedang NEM siswa baru kelas I rata-rata 6,49.

Pada jenjang SMA/K dengan memperhitungkan indikator internal dan eksternal, maka masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah:

- a. Kualifikasi guru yang blm sarjana: pada SMA 115 Orang (8,21%), pada SMK 227 orang (12,81 %). Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru-guru tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak layak mengajar.
- b. Masih terdapat Ruang Kelas milik yang kondisinya tidak baik yang memerlukan rehab baik berat maupun ringan. Pada SMA yang memerlukan rehab berat 20 ruang (3,82%) dan rehab ringan 34 ruang (6,50%); pada SMK yang memerlukan rehab berat 111 ruang (19,30 %) dan rehab ringan 44 ruang (7,65 %).
- c. Kepemilikan sarana penunjang pembelajaran seperti ruang perpustakaan, Lapangan OR, ruang UKS, ruang Ketrampilan, ruang BP, Ruang Serba Guna baru mencapai 62 %, kebanyakan yang tidak mempunyai adalah lembaga sekolah swasta.
- d. Kebutuhan Lab. pada lembaga SMA adalah Lab Fisika, Lab Kimia, Lab. Biologi, Lab. Bahasa dan Lab Komputer dengan ketercapaian 47 % dan yang belum memiliki kebanyakan adalah lembaga sekolah swasta. Pada lembaga SMK kebutuhan Lab IPA, Lab Bahasa an Lab Komputer juga baru tersedia 40 %, sedang

ketersediaan bengkel baru pada 25 sekolah padahal kebutuhan yang ada mencapai 37 sekolah.

- e. Mutu Proses Belajar Mengajar masih rendah, hal ini ditandai dengan penurunan NEM masukan (siswa baru kelas I) dibanding NEM keluaran (lulusan) , yaitu pada SMA dari 5,70 menjadi 5,34 , pada SMK dari 5,76 menjadi 5,62.
- f. Penyediaan buku pokok pada SMA/K belum mencapai rasio buku : siswa = 1 : 1.

Permasalahan relevansi pendidikan hingga saat ini yang paling menonjol adalah masih belum korelatipnya antara lulusan pendidikan pada jenjang menengah baik lulusan pendidikan menengah umum yang tidak berkesempatan melanjutkan ke pendidikan tinggi maupun lulusan pendidikan kejuruan yang disiapkan menjadi tenaga kerja langsung dengan kebutuhan pasar kerja pada dunia usaha dan dunia industri.

Dari kajian yang dilakukan penyebab permasalahan relevansi adalah:

- a. Masih lemahnya prosedur penjurusan siswa SMA ke jurusan IPA/IPS/Bahasa.
- b. Siswa jurusan IPS dan Bahasa masih jauh lebih besar dibanding jurusan IPA yaitu 88,17%.
- c. Terbatasnya sarana prasarana pendukung serta kompetensi tenaga pendidik yang ada.
- d. Penataan jurusan dan porsi siswa menurut jurusan pada pendidikan kejuruan belum sepenuhnya sesuai dengan permintaan jenis-jenis pasar kerja unggulan dan peta pengembangan industri/dunia usaha.
- e. Kurangnya kepedulian dunia usaha terhadap SMK sehingga sulit mencari kerjasama untuk melaksanakan PSG.
- f. Dunia usaha masih membatasi jumlah pemegang sehingga menyulitkan lembaga SMK mengarahkan siswanya untuk melaksanakan PSG.
- g. Masih terdapat 60 SMK (84,50 %) tidak memiliki ruang Ketrampilan, 58 SMK (81,69 %) tidak memiliki ruang Serbaguna, 12 SMK dari 37 SMK yang mempunyai jurusan otomotif (32 %) tidak memiliki bengkel.

3. Permasalahan Efisiensi dan Efektifitas Manajemen Pendidikan

Terkait dengan penguatan tata-kelola, akuntabilitas dan citra publik, permasalahan yang ada adalah belum optimalnya manajemen pengelolaan pendidikan pada lembaga sekolah.

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan pada lembaga sekolah belum sepenuhnya optimal, hal ini ditandai oleh efisiensi internal yang relatif rendah yaitu masih adanya angka mengulang dan putus sekolah, pendayagunaan ruang kelas yang masih dapat lebih ditingkatkan, supervisi yang belum optimal, dan biaya operasional yang belum memadai.

Disamping itu frekwensi pengawasan yang belum optimal serta biaya operasional yang masih rendah dan masih tingginya prosentase guru yang tidak layak mengajar merupakan indikasi permasalahan pengelolaan pendidikan.

B. TELAAH VISI DAN MISI

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan mengemban misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki daya saing untuk mendukung perwujudan visi MADEP MANTEB.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam indikator kesejahteraan masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan pendidikan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang ada di skala regional, indeks pendidikan merupakan satu-satunya faktor IPM di Kabupaten Malang yang mempunyai perkembangan positif dari tahun ke tahun, sehingga kondisi ini kiranya harus tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Selanjutnya sebagai perwujudan hak dasar, pelayanan pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, kondisi fisik, dan perbedaan lainnya.

Pada sisi lain, luas wilayah, besarnya jumlah penduduk serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang yang sebagian besar adalah warga pedesaan, merupakan tantangan nyata di bidang pendidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas serta relevan dan korelatif dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.

Memperhatikan hal tersebut, sumberdaya pendidikan yang harus disiapkan untuk memenuhi pelayanan yang optimal bagi seluruh warga masyarakat harus seimbang dengan kebutuhan yang ada.

Sebagai salah satu gambaran, jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang SD yaitu usia 7-12 tahun sebanyak 225.914 anak, sehingga sumberdaya yang harus disiapkan dengan segala perangkatnya mencapai 1.117 lembaga SD negeri.

Ketersediaan sumber daya tersebut bahkan belum mencukupi, sehingga masih dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan lembaga sekolah yang jumlahnya mencapai 347 lembaga.

Namun dengan segala keterbatasan sumberdaya pendidikan, tugas dan tanggung jawab mengemban misi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh melalui pentahapan dan pertimbangan skala prioritas.

C. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh aspek pembangunan di Kabupaten Malang juga harus berpijak pada rencana pembangunan secara nasional. Sehingga pembangunan pendidikan yang merupakan prioritas pembangunan nasional secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Malang.

Rencana pembangunan dan pengembangan Pendidikan di Kabupaten Malang disamping mengacu dan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang juga mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pendidikan tingkat nasional dan tingkat provinsi yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 serta Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2010-2014.

Misi Kementerian Pendidikan Nasional yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan (4) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan juga menjadi landasan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk mendukung perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Malang MADEP MANTEB.

D. ISU STRATEGIS

Memperhatikan seluruh aspek mulai dari kondisi pencapaian, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta permasalahan internal yang teridentifikasi, maka isu strategis pembangunan pendidikan dalam kurun 2011 – 2015 adalah:

1. Ketersediaan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas masih terbatas.
2. Keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas belum sepenuhnya optimal.
3. Kualitas dan relevansi pendidikan kesetaraan berkelanjutan masih terbatas.
4. Kepastian untuk memperoleh pendidikan belum mantap.
5. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah belum optimal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI DAN MISI

1. Visi

"Terwujudnya insan intelektual yang berakhlak, berwawasan demokratis, cerdas dan professional".

- a. Insan intelektual yang berakhlak dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan pikiran dan tindakan positif serta mampu menghindari pikiran dan tindakan negatif sesuai norma-norma agama, sosial dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Insan intelektual yang berwawasan demokratis dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang mempunyai kapabilitas untuk berinteraksi sosial, bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan serta menghargai pendapat orang lain, berjiwa kebangsaan dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.
- c. Insan intelektual yang cerdas dimaksudkan sebagai insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan:
 - (1) kecerdasan spiritual yaitu kemampuan untuk beraktualisasi diri dalam menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, budi pekerti luhur, dan kepribadian unggul.
 - (2) kecerdasan emosional yaitu kemampuan beraktualisasi diri dalam mengendalikan diri serta mempunyai kepekaan sosial.
 - (3) kecerdasan sosial yaitu kemampuan beraktualisasi diri dalam realitas interaksi sosial.
- d. Insan intelektual yang profesional dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam mengekspresikan potensi, bakat dan ketrampilan yang dimiliki serta mempunyai kecakapan bekerja untuk mendukung kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat lingkungannya.

2. Misi

Secara umum misi pembangunan pendidikan Kabupaten Malang adalah "Mewujudkan pelayanan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas". Secara khusus dengan mengacu pada misi pembangunan pendidikan nasional tahun 2010 – 2014 dan misi pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Timur serta dalam rangkaian mendukung misi Pemerintah Kabupaten Malang, adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan (M1).
2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan (M2).
3. Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan (M3).
4. Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan (M4).
5. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan (M5).

B. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai langkah operasional yang terukur untuk mencapai visi dan misi.

Tujuan strategis pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang dalam kurun 2011 s.d. 2015 adalah :

1. Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang (T1).
2. Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T2).
3. Tterjaminnya keterjangakauan pelayanan pendidikan menengah berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T3).
4. Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak (T4).
5. Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal (T5).

Adapun sasaran strategis pembangunan pendidikan tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang (T1), sasaran strategisnya meliputi:
 - a. APK PAUD mencapai 83,06%.
 - b. Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45 %.
 - c. Kualifikasi S1 pendidikan PAUD Informal dan Non formail mencapai 50 %.

Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T1, sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2010)	TAHUN				
			2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Prosentase APK PAUD	36,29	59,58	65,45	71,32	77,19	83,06
2	Kualifikasi pendidik PAUD formal berkompentensi S1	20	25	30	35	40	45
3	Kualifikasi pendidik PAUD Informal dan Nonformal berkompentensi S1	25	30	35	40	45	50

2. Untuk mewujudkan terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T2), sasaran strategisnya meliputi:
 - a. APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20%.
 - b. APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98%.
 - c. APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100%.
 - d. APM SMP/SMPLB/Paket B mencapai 90%.
 - e. % Angka Putus Sekolah maksimal 0,5% untuk jenjang SD/ SDLB/ Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B.
 - f. Rasio guru siswa SD 1:7 dan SMP 1:15.
 - g. Rasio guru siswa per kelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2.
 - h. % Angka pendidikan yang ditamatkan SD 100% dan SMP 100%.
 - i. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD 1:192 dan SMP 1:324.
 - j. % Lembaga Sekolah terakreditasi B minimal mencapai 85 %.

Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T2, sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2010)	TAHUN				
			2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Prosentase APK SD/SDLB/ Paket A	112,94	113,05	113,10	113,15	113,15	113,20
2	Prosentase APK SMP/SMPLB/Paket B	85,57	88,5	90	91,5	93,5	95
3	Prosentase APM SD/SDLB/ Paket A	97	99	99,4	99,6	99,8	100
4	Prosentase APM SMP/SMPLB/Paket B	67	70	75	80	85	90
5	Prosentase Angka putus sekolah untuk jenjang SD/SDLB/ Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B	1,40	1,30	1,10	0,90	0,70	0,50
6	Rasio guru siswa SD dan SMP	SD1:17 SMP1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15
7	Rasio guru siswa per kelas rata-rata SD dan SMP	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2
8	Prosentase pendidikan yang ditamatkan SD dan SMP	100	100	100	100	100	100
9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD dan SMP	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324
10	Prosentase Lembaga sekolah terakreditasi B	75	77	79	81	83	85

3. Untuk mencapai terwujudnya layanan pendidikan kesetaraan yang murah, berkualitas dan berkelanjutan (T3), sasaran strategis meliputi :
- APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80 %.
 - APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75 %.
 - % Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K mencapai 100%.
 - Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K 432.
 - % Lembaga sekolah terakreditasi B minimal 85%.

Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T3, sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2010)	TAHUN				
			2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Prosentase APK SM/SMLB/ Paket C	59	65	70	75	80	85
2	Prosentase APM SM/SMLB/ Paket C	55	60	65	70	75	80
3	Prosentase Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K	99,99	100	100	100	100	100
4	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K	432	432	432	432	432	432
5	Prosentase Lembaga sekolah terakreditasi B	73	75	80	85	90	95

4. Untuk mewujudkan terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak (T4), sasaran strategisnya adalah:
- % Daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu mencapai 60%.
 - % Angka melek Huruf (AMH) 100%.

Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T4, sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2010)	TAHUN				
			2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Prosentase Daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu	60,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
2	Prosentase Angka Melek Huruf (AMH)	93,00	96,08	97,06	97,63	98,81	100

5. Untuk mencapai terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal (T5), sasaran strategis yang akan dicapai adalah:
- % SPM pendidikan telah mencapai 95% lembaga sekolah.

- b. % Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%.

Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis Dari Tujuan Strategis T5, sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2010)	TAHUN				
			2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	Prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan	75,00	85,00	86,00	88,00	90,00	95,00
2	Prosentase Lembaga sekolah yang memiliki website	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kebijakan berkaitan dengan cara-cara dan langkah yang sistematis dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

1. Strategi Pembangunan Pendidikan 2011-2015

Strategi pembangunan pendidikan merupakan gambaran upaya dan langkah sistematis untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

- a. Tujuan Strategis T1, yaitu: Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang (T1), dicapai dengan menggunakan Strategi sebagai berikut:
- (1) Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 83,06%.

- (2) Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45%.
 - (3) Peninpendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%.
- b. Tujuan Strategis T2, yaitu: Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T2), dicapai dengan menggunakan Strategi sebagai berikut:
- (1) Peningkatan prosentase APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20%.
 - (2) PenPeningkatan prosentase APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98%.
 - (3) Peningkatan prosentase APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100%.
 - (4) Peningkatan prosentase APM SMP/SMPLB?Paket B mencapai 90%.
 - (5) Penurunan Angka Putus Sekolah maksimal 0,50% untuk jenjang SD/SDLB/Paket a dan SMP/SMPLB/Paket B.
 - (6) Peningkatan penyediaan jumlah guru untuk jenjang SD dan SMP sesuai rasio untuk SD 1:17 dan SMP 1:15.
 - (7) Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan untuk SD 100% dan SMP 100%.
 - (8) Peningkatan rasio ketersediaan sekolah untuk penduduk usia sekolah untuk jenjang SD 1:192 dan SMP 1:324.
 - (9) Peningkatan prosentase lembaga sekolah SD/SMP terakreditasi B minimal 85%.
- c. Tujuan Strategis T3, yaitu: Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan menengah berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T3), dicapai dengan menggunakan Strategi sebagai berikut:
- (1) Peningkatan prosentase APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%.
 - (2) Peningkatan prosentase APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75%.

- (3) Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SMA/K mencapai 100%.
 - (1) Pencapaian prosentase lembaga sekolah SMA/K terakreditasi B minimal 85%.
- d. Tujuan Strategis T4, yaitu: Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak (T4), dicapai dengan menggunakan Startegi sebagai berikut:
- (1) Peningkatan daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu mencapai 60%.
 - (2) Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 100%.
- e. Tujuan Strategis T5, yaitu: Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal (T5), dicapai dengan menggunakan Strategi sebagai berikut:
- (1) Peningkatan prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah mencapai 95%.
 - (2) Peningkatan prosentase lembaga lekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%.

2. Kebijakan

Berdasarkan strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015, kebijakan pembangunan pendidikan dirumuskan sebagai berikut:

NO.	TUJUAN STRATEGIS	STRATEGI	KEBIJAKAN
I	Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang (T1);	1. Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 83,06% 2. Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45% 3. Peninpendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%	Peningkatan jumlah lembaga PAUD berkualitas dan merata Peningkatan jumlah pendidik PAUD berkualifikasi pendidik (S1) Peningkatan kualitas sistem pembelajaran pada lembaga PAUD

II	Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata (T2);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prosentase APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20% 2. Peningkatan prosentase APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98% 3. Peningkatan prosentase APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100% 4. Peningkatan prosentase APM SMP/SMPLB/aket B mencapai 90% 5. Penurunan Angka Putus Sekolah maksimal 0,50% untuk jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B 6. Peningkatan penyediaan jumlah guru untuk jenjang SD dan SMP sesuai rasio untuk SD 1:17 dan SMP 1:15 7. Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan untuk SD 100% dan SMP 100% 8. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah untuk penduduk usia sekolah untuk jenjang SD 1:192 dan SMP 1:324 9. Peningkatan prosentase lembaga sekolah SD/SMP terakreditasi B minimal 85% 	<p>Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SD/SDLB dan Paket A</p> <p>Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SMP/SMPLB dan Paket B</p> <p>Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SD/SDLB dan Paket A</p> <p>Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SMP/SMPLB dan Paket B</p> <p>Peningkatan jumlah lembaga sekolah yang berkualitas, mudah dijangkau dan merata</p> <p>Meningkatkan jumlah guru dan meningkatkan kompetensinya</p> <p>Meningkatkan sistem pembelajaran yang optimal</p> <p>Meningkatkan jumlah lembaga sekolah untuk jenjang SD dan SMP</p> <p>Meningkatkan kemandirian lembaga sekolah dmengan peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP</p>
III	Terwujudnya layanan pendidikan kesetaraan yang murah, berkualitas dan berkelanjutan (T3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prosentase APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80% 2. Peningkatan prosentase APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75% 3. Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SMA/K mencapai 100% 4. Pencapaian prosentase lembaga sekolah SMA/K terakreditasi B minimal 85% 	<p>Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SM/SMLB dan Paket A</p> <p>Peningkatan jumlah dan daya tampung lembaga sekolah SM/SMLB dan Paket C</p> <p>Peningkatan sistem pembelajaran yang berkualitas untuk jenjang SMA/K</p> <p>Meningkatkan kemandirian lembaga sekolah dmengan peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMA/K</p>

IV	Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak (T4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu mencapai 60% 2. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 100% 	<p>Peningkatan jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memadai</p> <p>Peningkatan pembelajaran keaksaraan kepada penduduk usia diatas 15 tshun</p>
V	ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal (T5).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prosentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah mencapai 95% 2. Peningkatan prosentase lembaga lekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90% 	<p>Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta manajemen sekolah</p> <p>Peningkatan pengenalan dan implementasi penerapan jaringan internet di lembaga sekolah</p>

Tabel 4.1

RENSTRA DINAS PENDIDIKAN 2011-2015

VISI	MISI	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM		KEGIATAN	
								URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Terwujudnya insan intelektual yang berakhlak, berwawasan demokratis, cerdas dan profesional	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan (M1)	Ketersediaan pelayanan pendidikan Anak usia Dini (PAUD) yang berkualitas masih terbatas	Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 83,06% 2. Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45% 3. Peningkatan kualifikasi S1 pendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50% 	<p>%APK PAUD</p> <p>% Kualifikasi pendidik PAUD formal berijazah S1</p> <p>% pendidik PAUD informal dan non formla berijaza S1</p>	<p>APK PAUD mencapai 83,06%</p> <p>Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45%</p> <p>Kualifikasi S1 pendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%</p>	<p>Peningkatan jumlah lembaga PAUD berkualitas dan merata</p> <p>Peningkatan jumlah pendidik PAUD berkualifikasi pendidik S1</p> <p>Peningkatan kualitas sistem pembelajaran pada lembaga PAUD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan pendidikan Anak Usia Dini 	<p>Peningkatan APK PAUD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pengembangan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi) 	<p>Jumah Peserta hadir dalam kegiatan Lomba Tingka PAUD</p>
	Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan (M2)	Keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas belum sepenuhnya optimal	Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20% 2. Peningkatan APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98% 3. Peningkatan APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100% 	<p>APK SD/SDLB/Paket A</p> <p>APK SMP/SMPLB/Paket B</p> <p>APM SD/SDLB/Paket A</p>			<ol style="list-style-type: none"> 2. Program Pengembangan pendidikan dasar 	<p>APK SD</p> <p>APK SMP</p> <p>APM SMP</p> <p>Aps SD</p> <p>Aps SMP</p> <p>SPM I.1. SD</p> <p>SMP</p> <p>SPM I.2.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian seragam 2. Pelatihan kompetensi 	<p>60.000 siswa miskin jenjang SD yang menerima bantuan seragam sekolah</p> <p>100 Guru yang</p>

				<p>4. Peningkatan APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 90%</p> <p>5. Penurunan prosentase angka putus sekolah maksimal 0,50% untuk jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B</p> <p>6. Pencapaian rasio guru siswa SD 1:7 dan SMP 1:15</p> <p>7. Pencapaian rasio guru siswa per kelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2</p> <p>8. Pencapaian prosentase angka pendidikan yang ditamatkan SD 100% dan SMP 100%</p> <p>9. Pencapaian rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD 1:192 dan SMP 1:324</p> <p>10. Peningkatan prosentase lembaga sekolah terakreditasi B minimal mencapai 85%</p>	<p>APK SMP/SMPLB/Paket B</p> <p>% angka putus sekolah maksimal 0,50%</p> <p>rasio guru siswa SD 1:7 dan SMP 1:15</p> <p>rasio guru siswa per kelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2</p> <p>prosentase angka pendidikan yang ditamatkan SD 100% dan SMP 100%</p> <p>rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD 1:192 dan SMP 1:324</p> <p>prosentase lembaga sekolah terakreditasi B</p>				<p>SD SMP SPM I.3. SD SMP SPM I.3. SMP SPM I.4. SMP SPM I.4 SD SMP</p>	<p>tenaga pendidik</p> <p>3. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi</p> <p>4. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP</p> <p>5. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs</p> <p>6. Penyelenggaraan Paket A setara SD</p> <p>7. Penyelenggaraan Paket B setara SMP</p> <p>8. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa</p>	<p>mengikuti pelatihan</p> <p>Jumlah peserta yang juara di tingkat Kabupaten Provinsi maupun Tingkat Nasional</p> <p>- Jumlah Lembaga yang mengikuti pelatihan BOS Online .</p> <p>- Jumlah lembaga penerima bantuan BPDGs</p> <p>Biaya Operasional DAK</p> <p>Jumlah WB Paket A yang mengikuti pembelajaran</p> <p>Jumlah WB Paket B yang mengikuti pembelajaran</p> <p>Jumlah peserta yang juara di tingkat Kabupaten</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

										<p>9. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD, MI, SMP dan MTs</p> <p>10. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (DAK)</p> <p>11. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (Pendamping DAK)</p> <p>12. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (Bantuan Provinsi)</p> <p>13. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik</p>	<p>Provinsi maupun Tingkat Nasional Jumlah siswa penerima bantuan UAS</p> <p>Jumlah lembaga penerima dana DAK fisik maupun Mutu</p> <p>Jumlah lembaga penerima dana DAK fisik maupun Mutu</p> <p>Jumlah lembaga penerima bantuan alat praktek dan peraga siswa</p> <p>Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan</p>
	Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan (M3)	Kualitas dan relevansi pendidikan kesetaraan berkelanjutan masih terbatas	Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan menengah berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata	<p>1. Peningkatan APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%</p> <p>2. Peningkatan APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75%</p> <p>3. Pencapaian prosen tase angka</p>	<p>% APK SM/SMLB/Paket C</p> <p>APM SM/SMLB/Paket C</p> <p>% angka pendidikan yang</p>			3. Program Pengembangan pendidikan menengah	<p>APK SMA/K/MA</p> <p>APM SMA/K/MA</p> <p>AL SMA/K/MA</p> <p>Aps SMA/K/MA</p>	<p>1. Penyelenggaraan Paket C setara SMA/K</p> <p>2. Pengembangan metode belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan</p>	<p>Jumlah WB Paket C yang mengikuti pembelajaran</p> <p>Jumlah lembaga yang mengikuti CBT(Computer</p>

				pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K mencapai 100%	ditamatkan jenjang SMA/K				AM SMA/K/MA	komunikasi	BasedTest)
				4. Pencapaian rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K 432	rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K 432					3. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA, SMK dan MA	Jumlah siswa penerima bantuan UAS
				5. Peningkatan prosentase lembaga sekolah terakreditasi B minimal 80%	% lembaga sekolah terakreditasi B					4. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Bantuan Provinsi)	Jumlah peserta yang juara di tingkat Kabupaten Provinsi maupun Tingkat Nasional
	Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan (M4)	Kepastian untuk memperoleh pendidikan belum mantap	Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak	1. Peningkatan prosentase daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu mencapai 60%	prosentase daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu			4. Pengembangan pendidikan luar sekolah	Angka Melek Aksara	1. Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti program pengentasan buta aksara
				2. Peningkatan prosentase Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 100%	% Angka Melek Huruf (AMH)					2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah peserta yang mengikuti program keterampilan
										3. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi pendidikan non formal
										4. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Bantuan Provinsi)	Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi pendidikan non formal
	Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan	Kualitas dan relevansi pendidikan kesetaraan berkelanjutan	Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan	Penyediaan guru profesional dan kompeten mendukung mutu pendidikan	Jumlah guru berkelayakan serta guru bersertifikat pendidik	Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas	Guru SD S1 67 %, dan 43 % ersertifikat ; Guru SMP S1	1. Program Pengembangan tenaga pendidik	Meningkatnya kelayakan, kompetensi dan profesionalitas pendidik	1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah peserta yang hadir

	pendidikan (M3)	masih terbatas	yang layak			guru	87 %, dan 40 % ersertifikat pendidik ; Guru SMA/K S1 100 %, 90 % bersertifikat pendidik	dan kependidikan		<p>2. Pelaksanaan uji coba kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3. Pembinaan kelompok kerj guru (KKG)</p> <p>4. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>5. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan kependidikan</p> <p>6. Pelaksanaan uij kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (Bantuan Provinsi)</p>	<p>Jumlah peserta yang hadir</p> <p>Jumlah Guru yang mengikuti UKG</p> <p>Jumlah peserta yang hadir</p> <p>Data base pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Jumlah peserta yang hadir</p>
	Meningkatkan kualitas / mutu dan relevansi layanan pendidikan (M5)	Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah belum optimal	Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang optimal	<p>1. Peningkatan prosentase SPM pendidikan telah mencapai 95% lembaga sekolah</p> <p>2. Peningkatan prosentase lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%</p>	<p>% SPM pendidikan</p> <p>% sekolah yang memiliki fasilitas internet</p>			2. Program Pengembangan Manajemen Pendidikan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan</p> <p>3. Pembinaan Dewan</p>	<p>Dokumen SAKIP yang baik</p> <p>Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan</p> <p>Jumlah peserta yang</p>	

											Pendidikan 4. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 5. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	hadir Data Pokok Pendidikan Jumlah Peserta yang hadir
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 4.2.
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang	1. Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 83,06%	APK PAUD	59,58	65,45	71,32	77,19	83,06
		2. Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45%	% pendidik PAUD formal kualifikasi S1	15	20	25	30	45
		3. Peningkatan kKualifikasi S1 pendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%	% pendidik PAUD non formal dan informal kualifikasi S1	20	25	30	40	50
2	Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata	1. Peningkatan APK SD/SDLB/Paket A mencapai 113,20%	APK SD/SDLB/Paket A	113,05	113,10	113,15	113,15	113,20
		2. APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 98%	APK SMP/ SMPLB/ Paket B	88,50	90	91,5	93,5	98
		3. APM SD/SDLB/Paket A mencapai 100%	APM SD/SDLB/Paket A	99	99,40	99,60	99,80	100
		4. APM SMP/SMPLB/Paket B mencapai 90%	% APM SMP/SMPLB/Paket B	70	75	80	85	90
		5. Penurunan prosentase angka putus sekolah maksimal 0,5% untuk jenjang SD/SDLB/Paket	% Angka putus sekolah di seluruh jejang	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

		A dan SMP/SMPLB/Paket B						
		6. Peningkatan penyediaan jumlah guru untuk jenjang SD dan SMP sesuai rasio untuk SD 1:17 dan SMP 1:15	Rasio Guru siswa jenjang SD dan SMP	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15
		7. Rasio Guru Murid perkelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2	Rasio Guru Murid perkelas rata-rata jenjang SD dan SMP	SD 1:1, SMP 1:2	SD 1:3, SMP 1:2	SD 1:3, SMP 1:2	SD 1:3, SMP 1:2	SD 1:3, SMP 1:2
		8. Angka pendidikan yang ditamatkan (perjenjang pendidikan) SD 100%, SMP 100%	% Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD dan SMP	SD 100%, SMP 100%	SD 100%, SMP 100%	SD 100%, SMP 100%	SD 100%, SMP 100%	SD 100%, SMP 100%
		9. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah SD 1:192, SMP 1:324	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	SD 192, SMP 324	SD 192, SMP 324	SD 192, SMP 324	SD 192, SMP 324	SD 192, SMP 324
		10. Lembaga Sekolah Terakreditasi B Minimal 85%	% Lembaga Sekolah terakreditasi B	77 %	79 %	81 %	83 %	85 %
3	Terwujudnya layanan pendidikan menengah yang murah, berkualitas dan relevan	1. % APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%	% APK SM/SMLB/Paket C	54 %	56 %	64 %	75%	80 %
		2. % APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75%	% APM SMA/SMLB/Paket C	49 %	55%	59 %	62 %	75 %
		3. % Angka putus sekolah maksimal 0,7% untuk jenjang SM/SMLB/Paket C	% Angka Putus Sekolah untuk jenjang SM/SMLB/Paket C	< 1,10 %	< 1,0, %	< 0,9 %	< 0,8 %	< 0,7 %
		4. Rasio Guru Murid SM/SMLB/Paket C 1:15	Rasio Guru Murid jenjang SM/SMLB/Paket C	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15

		5. Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K 100%	% Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD dan SMP	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah SMA/K 432	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	432	432	432	432	432
		7. Lembaga Sekolah Terakreditasi B Minimal 85%	% Lembaga Sekolah SMA/K terakreditasi B	75%	80%	81%	83%	85%
4	Terwujudnya layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat	% Meningkatkan daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu 60%	% Meningkatkan daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang	20	32	40	45	60
5	Tersedianya layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) 100%	% Angka Melek Huruf	96,08%	97,06%	97,63%	98,81%	100%
6	Terwujudnya sistem pengelolaan pendidikan jenjang PAUD, Dasar dan Menengah serta pendidikan luar sekolah yang akuntabel, demokratis dan mandiri	1. % SPM pendidikan telah mencapai 40% lembaga sekolah 2. Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet 90%	% lembaga sekolah yang telah mencapai SPM % Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet	20%	25%	30%	35%	40%
				50%	60%	70%	80%	90%

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Implementasi dan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi hingga arah kebijakan pembangunan pendidikan dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008.

Rencana Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi kegiatan:

- a. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APBD Kabupaten Malang.
- b. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APBD Provinsi Jawa Timur.

Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2010)	TARGET				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
APK PAUD	36,29	59,58	65,45	71,32	77,19	83,06

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, meliputi kegiatan:

- a. Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah.
- b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.
- c. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi.
- d. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP.
- e. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD dan SMP.
- f. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/SMP (DAK).
- g. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/SMP (Pendamping DAK).

h. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi Jawa Timur).

Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2010)	TARGET				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
APK SD/SDLB/Paket A	113,00	113,05	113,10	113,15	113,15	113,20
APK SMP/SMPLB/Paket B	85,57	88,50	90,00	91,50	93,50	95,00
APM SD/SDLB/Paket A	97,00	99,00	99,40	99,60	99,80	100
APM SMP/SMPLB/Paket B	67,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
% Angka putus sekolah untuk jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B	1,40	1,30	1,10	0,90	0,70	0,50
Rasio guru siswa SD dan SMP	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15	SD 1:17 SMP 1:15
Rasio guru siswa perkelas rata-rata SD dan SMP	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2	SD 1:3 SMP 1:2
% pendidikan yang ditamatkan SD dan SMP	100	100	100	100	100	100
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD dan SMP	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324	SD 192 SMP 324
% Lembaga sekolah terakreditasi B	75	77	79	81	83	85

3. Program Pendidikan Menengah, meliputi kegiatan:

- a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah.
- b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik.
- c. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA.
- d. Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan teknologi Informasi dan Komunikasi.
- e. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA dan SMK.

- f. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bantuan Provinsi Jawa Timur).

Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2010)	TARGET				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
APK SM/SMLB/Paket C	59,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
APM SM/SMLB/Paket C	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
% Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K	99,99	100	100	100	100	100
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/K	432	432	432	432	432	432
%Lembaga sekolah terakreditasi B	73,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00

4. Program Pendidikan Non Formal, meliputi kegiatan:

- a. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan.
- b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup.
- c. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal.
- d. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Bantuan Provinsi Jawa Timur).

Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2010)	TARGET				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
% daya tampung layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah dan kurang mampu	60,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
% Angka Melek Huruf (AMH)	93,00	96,08	97,06	97,63	98,81	100

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi kegiatan:

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik.
- b. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c. Pembinaan kelompok Kerja Guru (KKG).
- d. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan.
- e. Pengembangan Sistem pendataan dan Pemetaan pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi Jawa Timur).

Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2010)	TARGET				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
% SPM pendidikan	75,00	85,00	86,00	88,00	90,00	95,00
% Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, meliputi kegiatan:

- a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan.
- b. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan.
- c. Pembinaan Dewan Pendidikan.
- d. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan.
- e. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu pendidikan.

Keberhasilan program tersebut dapat diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2010)	TARGET				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
% SPM pendidikan	75,00	85,00	86,00	88,00	90,00	95,00
% Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

Tabel 5.1

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR
						2011		2012		2013		2014		2015		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1. Ketersediaan pelayanan pendidikan PAUD berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang	1. Peningkatan prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 83,06% 2. Peningkatan kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 45% 3. Peningkatan Kualifikasi S1 pendidikan PAUD informal dan non formal mencapai 50%	1. % APK PAUD 2. % Pendidik PAUD Kualifikasi S1 3. % Pendidik PAUD Non Formal dan Informal Kualifikasi S1	A. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi Jawa Timur)	1. % APK PAUD 2. Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal 3. Kualifikasi pendidik PAUD informal dan non formal berkompentensi S1	36,29 % 20 25	59,58	816,52	65,45	1.100,34	71,32	1.265,39	77,19	1.455,20	83,06	1.673,48	Tercapainya APK PAUD 83,06 %
						25	650,00	30	700,00	35	700,00	40	700,00	45	700,00	Tercapainya kualifikasi S1 45%
						30		35		40		45		50		Tercapainya kualifikasi S1 50%
2. Terjaminnya keterjangkauan pelayanan pendidikan dasar berkualitas, murah, mudah terjangkau dan merata	1. Peningkatan APK SD/SDLB/ Paket A mencapai 113,20 % 2. Peningkatan APK SMP/SMPLB/ Paket B mencapai 98 % 3. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/ Paket A mencapai 100% 4. Peningkatan Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/ Paket B mencapai 90% 5. Penurunan prosentase Angka putus sekolah maksimal 0,5% untuk jenjang SD/SDLB/ Paket A dan SMP/SMPLB/ Paket B 6. Rasio guru siswa SD mencapai 1:17	1. APK SD 113,20 % 2. APK SMP 95 % ; 3. APM SD 100% 4. APM SMP 90% 5. Rasio Guru Murid (Perjenjang Pendidikan) SD 1 : 17 SMP 1 : 15 6. Rasio Guru Murid perkelas rata-rata (perjenjang pendidikan) SD 1:3, SMP 1: 7. Putus SD 0 %, Putus SMP < 0,5 % 8. Angka pendidikan yang ditamatkan (perjenjang pendidikan) SD 100%, SMP 100%. 9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (perjenjang pendidikan) SD 192, SMP 324 10. Lembaga Sekolah terakreditasi B	B. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 1. Pengadaan pakaian seragam sekolah 2. Pelatihan kompetensi tenaga kependidikan 3. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 4. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Pesantren Salafiah dan Satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP 5. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD dan SMP 6. Penyelenggaraan Paket	1. APK SD 113,20 %	112,94%	113,05		113,10		113,15		113,15		113,20	113,20 %	
				2. APK SMP 95 %	85,57%	88,50		90,00		91,50		93,50		95,00	95 %	
				3. APM SD 100%	97%	99	100	99,40		99,60		99,80		100	100%	
				4. APM SMP 90%	67%	70	60	75		80		85		90	90 %	
				5. Angka putus sekolah untuk jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B)	1,40 %	1,30		1,10		0,90		0,70		0,50	0,50	
													100	114	600 pendidik	
													66	60,5	390 siswa	
															600 WB	

	dan SMP mencapai 1:15 7. Rasio guru siswa perkelas rata-rata SD 1:3 dan SMP 1:2 8. Angka pendidikan yang ditamatkan (perjenjang pendidikan) SD 100%, SMP 100% 9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (perjenjang pendidikan) SD 192, SMP 324 10. Lembaga Sekolah terakreditasi B minimal mencapai 85 %.	minimal mencapai 85 %.	7. A setara SD Penyelenggaraan Paket B setara SMP 8. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 9. Penyelenggaraan ujian akhir sekolah (UAS) Sd dan SMP 10. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD dan SMP (DAK) 11. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD dan SMP (pendamping DAK) 12. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (bantuan provinsi Jawa timur)	150 WB 21 jenis lomba	150 wb 21 jenis lomba	100 400	150 wb 21 jenis lomba	100 400	150 wb 21 jenis lomba	100 450	150 wb 21 jenis lomba	120 526	150 eb 21 jenis lomba	120 526	900 wb 126 kegiatan	
3. Terwujudnya layanan pendidikan kesetaraan yang murah, berkualitas dan berkelanjutan	1. % APK SM/SMLB/Paket C mencapai 80%; 2. % APM SM/SMLB/Paket C mencapai 75%; 3. % Angka putus sekolah maksimal 0,7% untuk jenjang SM/SMLB/Paket C 4. Rasio guru siswa SM/SMLB/Paket C mencapai 1:15 5. Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/K mencapai 100% 6. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/K mencapai 432 7. Lembaga sekolah terakreditasi B minimal 85%	1. APK SM > 67 % 2. Angka Putus Sekolah < 0,7 % 3. Masing-masing kawasan pemb. dan kecamatan di perbatasan mempunyai lembaga SMK negeri ; 4. Seluruh SMK N menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewira-usahaan 5. Seluruh lembaga SMA/K mengimplementasikan integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam KTSP	C. Program Pendidikan Menengah 1. Penambahan ruang kelas sekolah 2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 3. Penyelenggaraan Paket C setara SMA 4. Pengembangan metode belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 5. Penyelenggaraan ujian akhir sekolah (UAS) SMA/K 6. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (bantuan provinsi Jawa Timur)	7. APK SM 62 % 8. APM SM 53 % 9. Angka Putus Sekolah < 0,7 % 10. Angka Kelulusan	65,00 % 60,00 % 1,30 % 100 %	70,00 % 65,00 % 1,10 % 100 %	75,00 % 70,00 % 0,90 % 100 %	80,00 % 75,00 % 0,70 % 100 %	85,00 % 80,00 % 0,50 % 100 %							
4. Terjaminnya kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) mencapai 100%	% Angka Melek Huruf (AMH)	D. Program Pendidikan Non Formal 1. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 2. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 3. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 4. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Bantuan provinsi Jawa Timur)	1. Angka Melek Huruf	93,00 100	96,08 100	400	97,06 100	400	97,63 100	400	98,81 100	450	100 100	450	98,81 600 WB 600 WB 600 Peserta
			E. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik		100 orang 150 orang	100 150 orang	150 170	100 150 orang	150 170	100 150 orang	150 170	100 Orang 150 orang	150 170	100 Orang 150 orang	150 170	600 orang 900 Orang

Ketersediaan, keterjangkauan dan relevansi pendidikan menengah yang optimal	1. % SPM pendidikan mencapai 40% lembaga sekolah 2. Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet mencapai 90%	1. % Lembaga sekolah yang mencapai SPM 2. % Lembaga sekolah yang memiliki fasilitas internet	dan tenaga kependidikan														
			3. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	250 orang	250 orang	200	250 orang	200	250 orang	200	250 orang	200	250 orang	200	250 orang	200	1.500 orang
			4. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	200 orang	200 orang	125	200 orang	125	200 orang	125	200 orang	125	200 orang	125	200 orang	125	1.200 orang
			5. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1 data base kepegawaian	100	100	1 data base kepegaw aian	100	1 data base kepegaw aian	100	1 data base kepegaw aian	100	1 data base kepegaw aian	100	1 data base kepegaw aian	100	100
			6. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (Bantuan provinsi Jawa Timur)														
			F. Program Manajemen pelayanan pendidikan														
				1. Penyusunan Data Pokok Pendidikan													
				2. Penyusunan Data Profil Pendidikan													
				3. Penyusunan Dokumen Perencanaan													
			1. Pelaksanaan hasil evaluasi kinerja bidang pendidikan	300 orang	300 orang	150	300 orang	150	300 orang	150	300 orang	150	300 orang	150	1.800 orang		
			2. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	15 Keg.	1.3.50	20 Keg	1.300	35 Kegiatan		
			3. Pembinaan dewan pendidikan	1 Kegiatan	1 Keg	50	1 Keg	50	1 Keg	50	1 Keg	50	1 Keg	50	6 Kegiatan		
			4. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 Dapodik,profil, dok perencanaan	1 Dapodik, profil, dok perencana naan	200	1 Dapodik, profil, dok perencana naan	200	1 Dapodik, profil, dok perencana naan	200	1 Dapodik,pr ofil, dok perencana an	200	1 Dapodik,pr ofil, dok perencana an	200	1 Dapodik,profil, dok perencanaan		
			5. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	300 Orang	300 Orang	90	300 Orang	90	300 Orang	90	300 Orang	90	300 Orang	90	1.800 Orang		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Implementasi dan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi hingga arah kebijakan pembangunan pendidikan dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2008.

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung TK Negeri Pembina
 - b. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK dan PAUD
 - c. Pengembangan PAUD
 - d. Pengembangan dan Sosialisasi kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran TK dan PAUD

3. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun
 - a. Pembangunan Gedung SMP Negeri
 - b. Pengembangan dan penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap
 - c. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
 - d. Pengadaan sarana prasarana sekolah Tingkat SD dan SMP
 - e. Rehabilitasi Gedung Sekolah SD dan SMP
 - f. Pembangunan fasilitas penunjang pembelajaran tingkat SMP
 - g. Worskshop KTSP Tingkat SD
 - h. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP
 - i. Pengembangan SD Sekolah Standart Nasional (SSN)
 - j. Pengembangan SMP Sekolah Standart Nasional (SSN)
 - k. Pengembangan SMP Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
 - l. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SD dan SMP
 - m. Workshop Comprehensif Teaching and Learning (CTL) tingkat SMP
 - n. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah tingkat SMP
 - o. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP

4. Program Pendidikan Menengah
 - a. Pembangunan Gedung SMK Negeri
 - b. Pembangunan fasilitas penunjang pembelajaran tingkat SMA dan SMK
 - c. Pengadaan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA / SMK
 - d. Workshop KTSP tingkat SMA/SMK
 - e. Workshop kompetensi teknis Guru SMK

- f. Workshop TIK di sekolah tingkat SMA/SMK
 - g. Perluasan jaringan kerjasama dengan DU/DI dalam rangka pengembangan bursa kerja lulusan SMK
 - h. Pengembangan kelembagaan dan MBS tingkat SMA
 - i. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah tingkat SMA/SMK
 - j. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Pake C setara SMA
5. Program Pendidikan Non Formal
- a. Pengembangan dan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan
 - b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
 - c. Sosialisasi dan Publikasi Pendidikan Non Formal
6. Program Pendidikan Luar Biasa / Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus
- a. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PLB
 - b. Workshop KTSP PLB
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
 - b. Pembinaan KKG dan MGMP
 - c. Peningkatan Kualifikasi Pendidik
 - d. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - e. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan
 - f. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik
 - g. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi PTP
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- a. Evaluasi hasil Kinerja Pendidikan
 - b. Pembinaan Dewan Pendidikan
 - c. Penerapan SIM Pendidikan

Tabel VI
INDIKATOR KINERJA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (AKHIR 2010)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM				
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TARGET
				TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01	PENDIDIKAN				99.002,36		133.415,28	
a	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya akses pdd 4-6 th ke PAUD	APK PAUD 53,71 %	59,58%	816,52	65,45%	1.100,34	71,32
b	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatnya akses pdd 13-15 th ke SMP	APK SMP 92,26 %	94,47%	93.217,32	96,68%	125.619,36	98,89
c	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya akses pdd 16-18 th ke SM	APK SM 39,25 %	45,40%	2.914,35	51,55%	3.927,37	57,70
d	Program Pendidikan Non Formal	Tuntas Buta Aksara & meningkatnya kecakapan hidup pdd	Angka Buta Aksara >45 th 0,76 % Kec. Hdp 72 %	0,43% 74 %	703,46	0,23% 76 %	947,99	0,00 78
e	Program Pendidikan Luar Biasa	Seluruh penyandang tuna tertampung pada PLB	APK PLB 65,54 %	69,76%	13,40	71,66%	18,06	75,56
f	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepend.	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi guru	Guru S1 prof. 58,49 %	66,79%	1.021,17	75,09%	1.376,13	83,39
g	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkanya mutu manajemen pelayanan sekolah	Sek ber IT 14,20 %	26,68%	316,14	39,16%	426,03	51,64

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011-2015 merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan melekat pada Dinas Pendidikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011-2015 disusun sebagai aktualisasi perencanaan dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan baik internal maupun perkembangan eksternal di tingkat regional, nasional maupun global.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai dokumen perencanaan, maka penyusunan berbagai program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan tahunan kiranya harus mengacu dan berpedoman pada Renstra yang telah disusun, agar penguangan program dan kegiatan tersebut realistis dan relevan dengan kebutuhan serta korelatif dengan rencana pencapaian target yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Teriring panjatan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan.

Dalam rangkaian tindak lanjut dan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Malang 2011 – 2015, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 - 2015 merupakan arah dan pedoman pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang yang hendak dicapai dalam kurun 2011 – 2015 dengan berpatokan pada pencapaian berbagai hasil pembangunan pendidikan saat ini.

Selanjutnya dalam perjalannya, Renstra telah dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi dan dituangkan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang.

Harapan terealisasi dan ketercapaian program pembangunan pendidikan yang sudah dituangkan, kiranya tidak terlepas dari motivasi, kebersamaan, dukungan dan koordinasi serta sinergitas seluruh komponen penyelenggara pendidikan di Kabupaten Malang.

Malang, 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196006221988111001